

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROYEK JALAN TOL SUNTER-PULOGEBANG DI JAKARTA TIMUR

Rizka Naufalian Zahra

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya bidang-bidang tanah untuk berbagai keperluan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Hal ini sering menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: (1) bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter–Pulogebang di Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum? dan (2) Apakah upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter – Pulogebang di Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara deskriptif. Dari hasil penelitian, penulis dapatkan kesimpulan bahwa pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur dalam tahapannya masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu pada tahapan pelaksanaan Penilaian ganti kerugian dan Musyawarah penetapan ganti kerugian. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur pada proses pemberian ganti kerugian dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi selama pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur dapat diselesaikan dengan cara penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan merujuk pada Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tol, Sunter-pulogebang

LAND PROCUREMENT FOR SUNTER-PULOGEBANG TOLL ROAD DEVELOPMENT IN EAST JAKARTA

Rizka Naufalian Zahra

Abstract

Law Number 2 of 2012 regarding Land Procurement for Public Utilities Construction is intended to ensure the availability of land for various development needs, one of which is the construction of toll roads. This often creates legal problems, thus encouraging the writer to conduct this research. The problems of the research study are: (1) how the procurement of land for the construction of the Sunter - Pulogebang toll road project in East Jakarta reviewed of Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest in the implementation of land acquisition and (2) what is the effort made by the East Jakarta Administrative City Land Office in overcoming barriers to Land Procurement for the construction of the Sunter - Pulogebang toll road in East Jakarta?. The research method used is normative juridical, namely research using library data derived from primary, secondary and tertiary legal sources which are analyzed descriptively. Based on the result of research, it can be concluded that the construction of the Sunter-Pulogebang toll road in East Jakarta has not been in accordance with Law Number 2 of 2012, specifically the implementation stage of the assessment of compensation and deliberation for compensation and efforts that can be made in resolving hindrances that occurred during the construction of the toll road can be resolved by deposit of compensation in the local District Court with reference to Article 42 paragraph 1 of Act Number 2 of 2012.

Keywords: Land Procurement, Toll Road Construction, Sunter-pulogebang